

“MAAF JALAN DITUTUP, ADA HAJATAN” REBUTAN RUANG ANTARA TRADISI DAN PRIVATISASI DI YOGYAKARTA

Nindyo Budi Kumoro

ABSTRAK

Tulisan ini membahas bagaimana tarik menarik antara hasrat kultural komunitas dengan ketiadaan ruang tradisi. Fokusnya mengambil pada komunitas Jawa di Yogyakarta yang masih sering memunculkan ekspresi kultural pada sebuah acara. Namun sebagaimana bentuk kota-kota modern lain, tata ruang pemukiman di Yogyakarta kurang mengakomodasi tergelarnya suatu acara tradisi yang biasanya membutuhkan ruang-ruang lebar. Betapa tata ruang kota telah terokupasi oleh kekuatan ekonomi liberal dimana segala ruang telah terprivatisasi. Yang tersisa di sana hanyalah gang, jalan, dan protokol yang dimanfaatkan untuk menggelarnya. Tulisan ini secara sederhana ingin melihat bahwa pertemuan antara globalisasi dan komunitas lokal menimbulkan efek-efek yang terkadang ambigu, semrawut, namun juga kreatif.

Kata Kunci: Ruang Tradisi, Privatisasi, Frontierisme, Globalisasi

Izinkan saya membagi kisah berikut. Malam itu terjadi kemacetan panjang di jalan dekat rumah, tepatnya jalan protokol Kota Yogya yang menghubungkan ke Solo. Berkilo-kilo meter mobil, motor bahkan bis dan truk terpaksa, hanya sesekali merayap. Ini tumben, waktu liburan dan lebaran pun nggak separah ini. Sungguh absurd, ternyata ada pentas wayang yang di episentrum kemacetan. Sebuah rumah makan menggelar wayangan dengan panggung di parkirannya yang sempit, sedangkan setengah badan jalan di-*tratag*¹ atau didirikan tenda untuk menjadi tempat duduk penontonnya. Pemakai jalan pun mengalah, hanya menggunakan setengah lajur untuk lewat motor, mobil dan bis-truk antar propinsi.

Penggunaan jalan sebagai ‘tribun’ penonton initalampak sah-sah saja.

¹ *Tratag* (Jw) dalam arti harafiah merupakan bangunan temporer untuk berteduh di sekitar bangsal Kraton Yogyakarta berbentuk kanopi beratap dan bertiang bambu (<http://id.wikipedia.org/>). Namun dalam bahasa sehari-hari, “*ditratag*” dapat mengacu pada pendirian tenda dan instalasi lainnya untuk keperluan suatu hajatan.

Paling tidak ini terlihat dari bapak polisi yang sibuk mengatur pengendara agar tak rebutan tempat dengan penonton wayang. Portal dari polisi berpadu dengan bambu yang dipalangkan, *plus* kursi di tengah jalan yang diduduki Hansip. Beberapa pemuda berjaga sambil *ngawe-awe* menyuruh kendaraan pelan-pelan antri lewat. Jelas, perjalanan yang direpotkan. Namun, alih-alih ada pengendara yang turun memprotes atau memperkarakan, mungkin paling banter hanya *nggrundel* seperti saya. Atau bisa jadi kebanyakan pengendara hanya maklum belaka.

Jika cerita itu hanya “meminjam” setengah badan jalan, di lain tempat sudah hal umum jalan ditutup penuh dan pengendara dialihkan ke lain jalur. Demi seseorang yang sedang *nduwe gawe*, pengendara umum seolah sudah mahfum perjalanannya direpotkan. Pengalaman saya di atas sepertinya telah menjadi perkara lazim, tatkala jalan raya dapat digunakan sebagai tempat alternatif untuk menggelar hajatan. Seperti kita tahu, wayangan merupakan pergelaran tradisi Jawa yang membutuhkan ruang-ruang yang lebar. Ini seragam seperti *perkawinan*, *layatan*, *slametan*, atau hajatan lain yang kental dengan selubung tradisi Jawa di Yogyakarta. Tapi bagaimana jika si pemilik hajat tak mempunyai tempat yang cukup untuk menggelar acara, apa lagi rumahnya di samping jalan raya? Ya jadilah gang, jalan kampung, atau jalan protokol pun ‘ditratag’ untuk menggelar hajat.

Apa yang akan ditunjukkan di sini hanya sebagai contoh kecil, bahwa hasrat kultural komunitas Jawa di sana-sini masih muncul ditengah aras modernisasi Kota Yogya yang terus melaju. Saya tak sedang membicarakan *Grebeg Maulud*, *Sekaten*, atau upacara Jawa monumental lain, namun lebih pada upacara hajatan sehari-hari yang seringkali lebih dalam, hangat, dan bermakna bagi setiap keluarga yang melabeli dirinya Jawa (Mulder, 1986). Akan tetapi yang terjadi betapa tata ruang modern kota saat ini sulit memberi tempat bagi tergelarnya hajatan-hajatan tersebut. Sekalinya akan menggelar hajatan, opsinya hanya di jalanan.

Hal ini membawa kita pada bagaimana pengaruh globalisasi dan neoliberalisasi yang masif saat ini berimplikasi pada ketersediaan ruang tradisi di perkotaan. Neoliberalisasi dalam hal ini bukan hanya pada ragam sistem ekonomi seperti yang dicanangkan kaum liberalis lama, namun bagaimana privatisasi terjadi dalam semua ranah kehidupan. (Priyono, 2011). Segala celah kehidupan masyarakat dimanfaatkan untuk mereguk keuntungan. Sistem neoliberal yang dominan di masyarakat inilah yang membuat tidak dibiarkannya ruang kosong sejangkal pun di perkotaan. Semua tanah menjadi diprivatkan, dipagari.

Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini berniat menyorot bagaimana komunitas Jawa di Yogyakarta melakukan siasat dan strategi dalam merespon ketiadaan ruang bagi upacara-upacara tradisinya. Fokusnya ‘mempermasalahkan’ betapa ruang tradisi yang sebenarnya terakomodasi dalam lingkungan Jawa tradisional pada saat ini telah digeser ke jalanan. Padahal, jalan raya sebagai

simbol modernitas kota sudah barang tentu mengakomodasi kepentingan individu penggunanya, bukan milik komunitas atau tradisi tertentu.

Ruang Mengakomodasi Tradisi

Dalam diskusi mengenai perubahan, tidak bisa tidak terdapat dua bentuk yang disyaratkan hadir; dahulu dan kini. Yang pertama acapkali terkenang akan hal-hal yang luhur, ideal, harmonis, komunal, dan seterusnya. Ini juga identik dengan *image* kultur Jawa lampau, dimana Yogyakarta secara klasik menyandang status sebagai patok kebudayaannya (Mulder, 1986). Imajinasi tentang 'dahulu' inilah yang bisa kita sebut sebagai *tradisi*, disebabkan adanya suatu konsep yang terus diwariskan sampai saat ini². Karena tradisi berdiri pada tatanan konseptual dan sebuah imajinasi masa lampau, bisa saja pada praktiknya ia berubah seiring zaman. Namun demikian, di luar tujuan praktis lainnya ia kadang muncul karena bisa berfungsi memberi legitimasi transenden bagi tindakan komunitas, khususnya terhadap acara yang terstruktur dengan persoalan hidup-mati yang tak terpecahkan (Laksono, 2009; Abdullah, 2006).

Itulah yang mendasari 'kini', peristiwa kelahiran, pernikahan, dan kematian yang dibalut dengan upacara tradisi Jawa seringkali masih muncul dalam realitas Kota Yogyakarta. Ini juga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai masyarakat Jawa pada saat tertentu merupakan kondisi yang riil dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekecang apapun modernitas menjamah Yogya, di sana-sini kita masih dapat menyaksikan hajatan-hajatan bernuansa tradisional.

Tapi apa benar dulunya acara-acara tradisi itu sama sekali bebas dari kolonialisasi ruang publik seperti cerita di atas? Nah di sini ada baiknya jika dibedakan dulu orang Jawa yang mana, sebab paling tidak terdapat dua tipe pemukiman di sana³. *Pertama* pada wilayah *Kraton* dan *Negara* dimana sekitarnya terdapat kampung tradisional tempat tinggal para abdi dalem dan sentana dalem yang mempunyai kepentingan dengan raja dan kraton. Pembagian kampung berdasarkan fungsi kerja para pembantu kraton. Pada wilayah ini pola pemukiman padat berhimpit dengan lorong-lorong kecil seperti halnya terlihat di kampung Kauman atau Kotagedhe misalnya.

Tipe *Kedua* terdapat dalam wilayah *Negaragung* berisi para petani pengelola tanah-tanah *mahosan dalem* (pajak), dan *Mancanegara* dimana

2 Bandingkan dengan penjelasan Irwan Abdullah (2006) mengenai perbedaan budaya generik dan budaya diferensial

3 Seperti yang dijelaskan Selo Soemardjan (1981), model Kerajaan Jawa kuno berpola konsentris berawal dari lingkaran *Kraton* dan wilayah *Negara* sebagai titik pusat, lalu berturut-turut diliputi lingkaran *Negaragung*, dan *Mancanegara* pada wilayah terluar. Wilayah *Kraton* dan *Negara* inilah yang menjadi ibu kota bagi Jawa Mataram, di mana bertempat di daerah Kota Yogyakarta saat ini

merupakan masyarakat desa yang dengan berbagai hasil buminya memberi pemasukan pada kraton. Di sini terdapat nuansa agraris yang cukup kental (*rural*), dengan tipe rumah-rumah lapang (jw: *amba*) juga pekarangan-pekarangan di sekelilingnya. Perbedaan ini penting karena nantinya kita melihat bahwa karakter rumah Jawa cukup kental dengan nuansa pertanian. Dengan demikian kita dapat mengambil representasi pada pemukiman Jawa tipe kedua, dari pada tipe *kutha-nagari* yang merupakan wilayah tata pemerintahan dan telah mengenal pembagian kerja terspesifikasi.

Pada representasinya, sebuah rumah tinggal Jawa (*joglo*) setidaknya terdiri dari dua bagian, *omah njero* dan *omah njaba*. *Omah njero* terdapat *sentong tengah*, *sentong* kiri, *sentong* kanan berwujud kamar-kamar yang juga digunakan untuk pemujaan kepada Dewi Sri atas hasil panen yang melimpah. Di depan deretan *senhong* terdapat *dalem* berupa ruang luas yang acap kali untuk meletakkan hasil panen (Kartono, 2005). Pada *omah njaba* terdapat *emperan* (pringgitan) dan juga *pekarangan* yang sering untuk menjemur gabah. Jika yang punya rumah seorang *priyayi*, maka racaknya terdapat *pendhapa* di bagian luar.

Dalam menggelar semacam pesta, *slametan*, *kenduri*, atau upacara apapun, jelas sangat praktis jika memiliki *pendhapa*. Bangunan ini terpisah dari rumah induk dan memang berfungsi sebagai ruang komunal yang lebih bersifat publik. Ada juga *pringgitan* yang biasanya untuk menggelar acara seni. Maka pada saat menggelar wayang seperti di atas, *layar* diletakkan sepanjang *pringgitan*, *dalang* dan perangkatnya di bagian *pendhapa* dengan penonton laki-laki, sedangkan perempuan menonton dari bagian belakang (bayangannya) di *emperan* rumah (*ibid*). Jikapun kurang masih ada pekarangan di sekitar.

Tapi bagaimana dengan rumah orang kebanyakan yang tak punya *pendhapa* misalnya? Di sinilah kecanggihan arsitektur rumah tradisional model *joglo* yang sangat akomodatif untuk menyelenggarakan suatu hajatan. Tata ruang dalam rumah tak tersekat banyak, tapi memberi ruang lebar pada bagian tengah-depan *omah njero*⁴. Bagian ini bisa jadi ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang apapun. Kamar tidur, dapur diberi porsi lebih sempit dan *nyempil* di sisi rumah. Ruang lebar ini di sisi lain dapat memberi tempat digelarnya ritus yang bersifat komunal-publik sebagaimana *slametan* dan *kenduri*. Keleluasaan ini juga berguna memfasilitasi sanak-saudara atau *kindred* manakala saat hari raya datang berkunjung.

Jika empunya *joglo* ini akan menggelar hajatan yang lebih besar seperti resepsi pernikahan atau wayangan, maka dinding-depan-kayu (*gebyok*) rumah ini dapat bongkar dan jika selesai bisa dipasang lagi. Kalau pun di dalam rumah tak

4 *Dalem* atau *omah njero* sebenarnya bisa disebut juga sebagai bagian utama domestik rumah Jawa.

Di sana terdapat tiga bagian; *senhong kiwa* dan *tengen* sebagai kamar tidur, dan *senhong tengah* sebagai ruang multifungsi untuk ruang keluarga, tamu, atau menggelar *slametan*.

memungkinkan untuk menggelar suatu upacara, *tratak* siap dipasang di sekitar halaman (*pekarangan*). Lingkungan hunian Jawa agraris sedikit banyak memang mempunyai *pekarangan* yang fungsi sehari-hari untuk bertanam palawija, hias, juga memelihara hewan ternak.

Gambaran sederhana tentang pengaturan hunian Jawa ini sedikit banyak memperlihatkan prioritas pola hidup berkomunitas yang terstrukturkan dalam tata ruang pemukiman. Antisipasi terhadap munculnya rasa individualistik mengada disebabkan adanya konsep-konsep tertentu seperti *rukun*. Sebagaimana *slametan* berfungsi untuk menunjukkan sebuah masyarakat yang rukun, yang merupakan prasyarat memohon berkat dari tuhan, roh halus dan nenek moyang (Geertz, 1960; Mulder, 1986). Masyarakat rukun adalah sebuah masyarakat yang satu, komunal. Simbol-simbol yang dipakai dalam ritual *convivium* (makan bersama: slametan) melambangkan masyarakat yang integral dan egaliter (Laksono, 2009). Abai terhadap hajatan, *slametan*, umumnya meninggalkan rasa tak senang, *rikuh*, kepada orang lain.

Menjadi terang tatkala arsitektur, tata ruang dan lingkungan rumah Jawa tradisional bukan ditujukan untuk privilese keluarga inti saja, namun juga pada komunitasnya yang lebih luas. Di dalam rumah terdapat tatanan spasial dan hierarki ruang, mulai dari ruang privat, semi privat, semi publik, sampai ruang publik (Sunaryo, 2009). Acara-acara tertentu yang melibatkan warga komunitas dapat ditampilkan didalam rumah atau di sekitarnya. Tapi memang tak menutup kemungkinan penggunaan ruang di luar lingkungan rumah, jalan misalnya. Cuma dengan adanya ruang-ruang seperti di atas, 'penjajahan' sarana publik jadi bisa diminimalisir. Lagi pula, tidak perlu repot dan merasa mengganggu manakala pekarangan masih banyak, jalan masih sepi dan tak se-formil sekarang⁵.

Ruang yang Terprivatisasi

Mungkin tak usah berpanjang-panjang bernostalgia akan kisah romantis hunian Jawa. Jelas kondisi kota Yogyakarta saat ini telah jauh berbeda. Sudah jarang di Yogyakarta dapat menemukan bentuk hunian berkarakter tradisional. Ada pandangan bahwa modernitas dan globalisasi membuat segalanya tampak seragam. Di lain hal pandangan ini bisa dibantah, seperti terdapat rumah *hybrid* Jawa-Eropa. Tapi sulit diingkari kalau secara umum bentuk pemukiman di kota ini memang tak ada bedanya dengan kota manapun; pemukiman padat-berhimpit dengan rumah-rumah model baru. Kebanyakan ya berdinding tembok, berlantai keramik, minim halaman dan mepet jalan. Tata ruang dalam rumah disekat tembok dalam proporsi yang hampir sama; ruang tamu, kamar tidur, ruang nonton tv,

⁵ Hingga awal tahun 1980, jalan di Yogyakarta masih didominasi kendaraan tak bermotor <http://www.tembi.org/majalah-prev/20100705.htm>

garasi, dan halaman kecil didepan. Yang paling penting adalah perubahan orang memandang rumah menjadi ruang yang hanya dikhususkan untuk kebutuhan eksklusif keluarga semata.

Sasaki Shiraishi (2001) dalam penelitian mengenai keluarga Jawa mengungkapkan keheranannya tatkala menjumpai rumah-rumah kota di Indonesia saling tersekat pagar-pegar tembok-besi kokoh. Seolah menyiratkan akan memberi kemanan dan kenyamanan bagi setiap keluarga. Jika masuk kedalamnya tanpa permissi bisa-bisa dianggap pencuri. Dengan setiap rumah yang dibentengi ini seolah mengokohkan kekuasaan privat keluarga. Terjadi pergeseran antara batas-batas yang dulunya sangat cair, saat ini tegas terbagi mana ruang privat mana ruang publik. Konsepsi mengenai 'batas' memang menjadi hal krusial pada masyarakat modern yang menjunjung kepemilikan pribadi. Hal ini sepertinya relevan dengan pola-pola neoliberalisme dimana ragam relasi manusia baik kultural, politik, legal, sosial, dst. tetap dipandu oleh prinsip transaksi pasar bebas yang berujung pada privatisasi (Herry-Priyono, 2006). Di sinilah 'batas' sangat penting yang merupakan instrumen utama sebuah hal menjadi privat atau bukan.

Cobalah sekilas kita melihat perumahan mewah gaya baru saat ini. Model rumahnya memang saling tak berpagar, seperti rumah-rumah Eropa. Tapi jangan dikira pengeliminasian pagar berfungsi sosio-kultural seperti di atas. Pagar tetap ada, bertransformasi menjadi benteng-benteng tinggi memagari perumahan untuk 'mengamankan' wilayah dari pemukiman warga lain yang kumuh, liar dan miskin di sekitarnya. Seolah terdapat *imagined security*, rasa aman terbayang dengan dilindungi benteng kokoh dan penjagaan satpam 24 jam. Eksklusivisme kemodernan di masyarakat perkotaan kita ini mempunyai ciri dengan dilandai rasa takut yang luar biasa pada unsur-unsur dari 'luar' rumah (Shiraishi, 2001).

Jika dirunut ke belakang, pola baru pemukiman baru orang Jawa atau Yogyakarta khususnya memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kolonial. Laksono (2000) mengatakan penetrasi modal pemerintah kolonial ke desa-desa Jawa untuk meliberalisasi pertanian membuat banyak sekali petani kalah saing, sehingga terlempar ke kota menjadi buruh-buruh lepas. Urbanisasi inilah antara lain berguna untuk membaca perilaku Jawa pedesaan yang kadang-kadang masih muncul di situasi eksklusivisme kemodernan kota. Terdapat sebuah kontinuitas tradisi agraris terkait adanya *peasant in the city* (Kemp dalam Abdullah, 2006).

Di luar sebab migrasi, perubahan model pemukiman Yogyakarta ini paling tidak dapat ditandai sejak kehadiran komunitas Eropa swasta secara masif pada peralihan abad 19 ke 20. Ini mendorong pembentukan Yogyakarta sebagai kota modern secara signifikan. Maka merebaklah bangunan *gedongan* bercorak Barat. Lebih-lebih saat era "pembangunan" dimana kran modernisasi dibuka lebar-lebar. Bentuk-bentuk tradisional segera saja menyandang beban kekolotan, termasuk

rumah-rumah warga. Kampung-kampung pun mengalami perubahan; pohon besar, pekarangan, ruang terbuka bermain anak, hilang tergantikan oleh hunian padat. Pun tak banyak lagi ruang semi publik semacam *pendhapa*, *pringgitan*, *omah dalem*, atau *pekarangan*.

Pertambahan penduduk dan laju modernitas lama-lama menkonversi sawah dan lahan (yang dianggap) kosong menjadi kompleks-komplek perumahan modern dan pertokoan. Tak dibiarkan ada tanah 'nganggur', sejengkal pun dibuat bangunan. Halaman tak usah lebar-lebar, mending dijual biar dibangun rumah orang. Terus bergeserlah kebiasaan *ngopeni* palawija di pekarangan menjadi pot-pot tanaman hias di teras rumah yang sempit. Di manapun sama saja, kota maupun pinggiran.

Efek kapitalisasi dan liberalisasi pada tanah itu membuat setiap ruang dan petak tanah dimiliki orang dengan eksklusif. Dalam bahasa Kuntowijoyo (2002), kekuatan ekonomi memaksa orang Jawa untuk mengubah pandangan mereka tentang tanah. Desakralisasi tanah terjadi, tanah yang sebelumnya tabu untuk dijual dan diatur dalam pewarisan, namun apa daya jika kini pemilik berhadapan dengan uang dan pasar. Jarang yang punya tanah luas, kebanyakan sempit berhimpit-himpit. Di luar itu yang tersisa hanyalah jalan raya, gang, atau lorong yang membelah kota Yogyakarta yang penuh pemukiman padat penduduk. Jalan menjadi satu-satunya ruang terbuka yang bebas dari rezimentasi modal atau hak milik perorangan.

Jalan: Antara *Siasat* dan *Frontierisme*

Mari kita membahas bagaimana respon masyarakat Jawa atas ketiadaan ruang tradisi. Mengikuti teorisasi Arjun Appadurai (1995) bahwa globalisasi yang datang *tidak* lantas menghilangkan sama sekali pola kebudayaan lama pada masyarakat tempatan. Selalu muncul siasat dan strategi untuk menjalankan nilai-nilai lokalitas mereka ditengah modernitas. Pendapat ini bisa digunakan untuk melihat masyarakat Jawa yang hidup ditengah hiruk pikuk modernitas kota Yogyakarta. Mereka masih mengadakan acara maupun ritual tradisional, walaupun kita tahu sulit menemukan tempat untuk menggelnnya.

Boleh kita bertanya, "*Iho kan masih ada tempat lain, menyewa gedung pernikahan misalnya?*". Memang, tapi tak semua orang mampu/mau menyewa tempat untuk itu. Di luar alasan tersebut, bagaimanapun "rumah" (*dalem*) masih menempati posisi yang esensial bagi tergelarnya acara tradisi Jawa. Pernikahan tradisi Jawa mengenal *kepanggih*, *siraman*, *midadareni*, *ngunduh mantu*, dst. yang mesti dilakukan di rumah pengantin perempuan. Jika tak menyewa gedung, resepsi pun digelar di sana. Habis itu masih ada *boyongan* yang mestinya dilakukan

di rumah si pria⁶.

Begitu juga dengan *layatan*. Dalam upacara kematian ini di beberapa tempat masih memerlukan ruang ‘lapang’ (halaman rumah) untuk: memandikan jenazah, ritual *mbrobosi* jenazah, pemberangkatan jenazah di depan rumah, dan jalan kaki memikul jenazah ke kuburan. Tentunya upacara-upacara itu masih dengan imanjinasi konsep ideal yang perlu ruang-ruang tertentu. Sebenarnya telah ada semacam rumah perawatan jenazah yang mengurus dari awal sampai pemakaman plus dengan tempat upacara yang tersedia. Namun jelas, selain butuh butuh dana yang tidak sedikit, bisa jadi ada kerisauan untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tradisi terhadap hal-hal yang menyangkut hidup-mati, takut kualat mungkin.

Nah, jika *pekarangan*, *pendhapa*, *pringgitan* hilang atau *omah dalem* tak lagi luas, maka untuk keberlangsungan tradisi problem keruangan tersebut perlu ‘disiasati’. Lantas jadilah jalan, gang, lorong pun termasuk menjadi *venue* acara. Setidaknya jika mendirikan *trata* di gang atau jalan tak ditarik bayaran oleh siapapun.

Walaupun hanya sementara, pemakaian jalan ini seirama dengan apa yang disebut Murray Melbin (1978) sebagai fenomena *frontierisme*. Daerah yang sebenarnya padat dengan aktivitas manusia dicitrakan sebagai *frontier*, sebuah daerah kosong tak bertuan yang dapat diduduki dan dikuasai. Hasrat untuk menduduki ruang kosong tersebut membangun ideologi *frontierisme* ini (Riomandha, 2000). Dengan kondisi pemukiman yang padat dan tak ada lagi ruang yang cukup terbuka, maka jalanan dipandang sebagai “frontier” yang dipinjam untuk menggelar suatu acara. Padahal dalam praktiknya sudah barang tentu sebuah jalan (entah gang entah jalan raya) penuh dengan orang berlalu lalang dan punya kepentingan masing-masing.

Ketika jalanan sedang menjadi daerah *frontier* yang diduduki, layaknya aneksasi, pastinya ada pihak yang tertaklukkan. Dalam hal ini pengguna jalan ditaklukkan oleh orang-orang yang sedang *nduwe gawe*⁷. Di wilayah *frontier*, hukum dan aturan-aturan formal dikesampingkan, sehingga interkasi yang terjadi kemudian selain menunjukkan kesemrawutan juga munculnya kompromi untuk menerima keadaan yang terjadi (*ibid*). Inilah mengapa seperti kisah di awal, sangat jarang para pengendara memprotes penghalangan (baca: penaklukan) jalan. Ada semacam hegemoni kultural yang mengambang di udara, membuat fenomena tersebut dianggap *lumrah*; “*biarkan saja lah, di mana lagi kalau nggak di jalan?*”

6 Lihat Clifford Geertz, “Abangan, Santri, Priyayi (1989). Memang Geertz meneliti tradisi upacara Jawa di Mojokuto pada tahun 1950an, namun karakteristik upacara ini masih mudah kita temukan di Yogyakarta pada saat ini.

7 Bandingkan dengan Transposia Riomandha (2000) yang meneliti tentang perilaku *frontierisme* PKL di trotoar Malioboro. *Ibid*

Teknis dalam menginvasi jalan ini memunculkan aturan-aturan tersendiri yang racaknya juga dipahami oleh si pemakai jalan. Terdapat rambu-rambu lalu lintas "lokal" seperti palang bambu, kursi, drum bekas, janur kuning maupun bendera putih. Janur kuning yang ada di mulut gang misalnya, penanda ini bukan hanya sebagai penunjuk tempat *ewuh*, tapi juga peringatan bagi pemakai jalan lain untuk perjalanannya siap-siap direpotkan. Lebih-lebih juga membahasakan bahwa jalan itu sedang tak boleh dilewati. Tak ada sanksi hukum jika dilanggar, tapi toh para pemakai jalan *manut* saja dengan rambu-rambu tradisional ini.

Seperti juga dikisahkan di awal, keberadaan polisi sebagai penegak hukum lalu lintas menjadi ambigu dan tak menjelaskan apapun. Ada semacam kombinasi kompromistis antara aturan kultural dan aturan formal pada peristiwa tersebut. Bahwa hukum dapat berkompromi dengan desakan-desakan tradisi. Begitu juga dengan fungsi jalan raya di Yogyakarta tak selamanya hanya jadi sarana transportasi kemodernan semata, tapi saat-saat tertentu dapat berubah menjadi "panggung budaya" terlegitimasi⁸.

Ambiguitas yang hadir pada contoh kasus jalanan Yogyakarta menjadi keniscayaan dalam sebuah arena pertarungan kebudayaan (*frontier*). Kita bisa mengambil apa yang disebut Anna L. Tsing (2005) sebagai friksi, yaitu 'gesekan' antara komunitas dengan sistem dunia modern (globalisasi) dalam memanfaatkan peluang/bersiasat pada "ruang-ruang kosong" yang tersisa. Gesekan ini menurut Tsing memunculkan gejala yang ambigu, bisa jadi semrawut, namun juga kreatif. Di sini kita bisa melihat bahwa ini salah satu cara komunitas Jawa mengkomunikasikan tradisinya ditengah arus modernitas dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.

Penutup

Dari penjelasan itu jalanan di kota Yogyakarta bisa di lihat dari dua hal, secara tradisional dan modern. Yang pertama jika melihat penggunaan jalan sebagai pergelaran acara tradisi, jalan masih dipandang sebagai 'perpanjangan halaman rumah'. Sehingga berguna bagi komunitas Jawa untuk mempertahankan lokalitas ditengah perkotaan yang padat dan penuh kapitalisasi ruang. Kedua, di sisi lain jalan raya kini telah menjadi bagian dari sarana modernitas yang memiliki hukum formal dan padat kepentingan pengguna di dalamnya. Suatu 'pendudukan' jalan bisa berakibat mengganggu kepentingan masyarakat yang lebih umum. Singkatnya, di satu pihak ini menjadi siasat, di pihak lain menjadi problem.

8 Juga bandingkan dengan Gunawan (2000) dalam "Permainan Tafsir" (Laksono, dkk) yang mencermati berbagai "aturan" di jalan raya. Selain aturan tertulis yang berujud simbol rambu lalu lintas juga terdapat 'bahasa' non-formal lain seperti lambaian tangan, teriakan, gerakan tubuh yang disepakati di antara pengguna jalan. *Ibid*

Fokus terhadap fenomena *pentratagan jalan* untuk sebuah acara tradisi sebenarnya hanyalah contoh kecil dari gejala sosial yang lebih besar, yaitu bagaimana globalisasi dan sistem neoliberal yang datang bergesekan dengan komunalisme dengan caranya masing-masing. Tidak selamanya pergesekan ini membuahkan hal baru, *hybrid*, atau apa yang disebut *glokalitas*. Kadangkala nilai satu lebih mencolok dari yang lain, tergantung pada kondisi yang membuat ia muncul lebih dominan. Ketika pada momen tertentu satu pihak lebih menonjol, maka ada pihak lain yang teraneksasi, seperti halnya efek modernitas yang dominan menghilangkan ruang-ruang tradisi di Yogyakarta. Sebaliknya, manakala kepentingan memunculkan hasrat tradisi menguat, maka ia akan menggeser pola sistem modern seperti kasus di jalan raya. Keduanya satu sama lain saling menempati ruang yang dianggap “hampa kebudayaan” (frontier). Dalam sebuah ruang yang sama, keduanya hadir sebagai sebuah kebudayaan diferensial, yang berfungsi relatif dan saling bernegosiasi dalam keseluruhan interaksi di masyarakat. Saya kira demikian. []

Daftar Bacaan:

- Abdullah, Irwan. 2006. “Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Appadurai, Arjun. 1995. *Localism, Globalism and Cultural Identity*, dalam Mike Featherstone, *Undoing Culture: Globalization, Postmodernism, and Identity*. London: Sage Publications
- Budiawan, Odit. 2006. “Siasat Kaum Urban di Ranah Tradisi” dalam Jurnal Balairung. Menerka Kota, Menakar Peradaban. Yogyakarta: BPPM Balairung UGM
- Geertz, Clifford. 1989. “Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.” Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Herry-Priyono, B. 2006. “Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan”. Makalah “Pidato Kebudayaan” Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), 10 November 2006, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta
- Kuntowijoyo. (2002). “Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas: Esai-esai Budaya dan Politik”. Bandung: Mizan
- Laksono, PM. 2000. “Jalanan Tanda Hampa Makna” dalam Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru. Laksono, PM., Nugroho Trisnu Brata, Kirik Ertanto, Transpiosa Riomandha, Gunawan. Yogyakarta: Insist Press dan Jerat Budaya
- . 2001. “Ilmu-Ilmu Humaniora, Globalisasi, dan Representasi Identitas.” Makalah Pidato Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada 2011
- . 2009. “Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan: Alih Ubah Model Berfikir Jawa”. Yogyakarta: Kepel Press
- Magnis-Suseno, Franz. 1984. “Etika Jawa: Sebuah Kajian Filasafi tentang Kebijakan Hidup Jawa”. Jakarta: Gramedia

- Mulder, Niels. 1996. "Pribadi Masyarakat Jawa". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kartono, Lukito J. 2005. "Konsep Ruang Tradisional Jawa dalam Konteks Budaya" dalam *Dimensi Interior*, Vol. 3, No. 2, Desember 2005: 124 – 136 <http://puslit.petra.ac.id/journals/interior/> diunduh pada 8 November 2012
- Riomandha, Transpiosa. 2000. "Dunia (Citra) Kaki Lima di Malioboro" dalam *Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru*. Laksono, PM., Nugroho Trisnu Brata, Kirik Ertanto, Transpiosa Riomandha, Gunawan. Yogyakarta: Insist Press dan Jerat Budaya
- Soemardjan, Selo. 1981. "Perubahan Sosial di Yogyakarta." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Shiraishi, Saya, S. (2001). "Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik." Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Sunaryo, Rony Gunawan, Nindyo Soewarno, Ikaputra, Bakti Setiawan. 2010. "Posisi Ruang Publik dalam Transformasi Konsepsi Urbanitas Kota Indonesia." Makalah Seminar Nasional Bidang Ilmu Arsitektur dan Perkotaan: Morfologi Transformasi dalam Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, 20 November 2010, Universitas Diponegoro, Semarang
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. New Jersey: Princeton University Press
- Tim Penulis. 2006. "Menjadi Jogja: Menghayati Jatidiri dan Transformasi". Yogyakarta: DKK dan PSK UGM
- Widayat, Ramanu. 2012. "Krobongan, Ruang Sakral Rumah Tradisi Jawa" <http://puslit.petra.ac.id/journals/interior/> diunduh pada 8 November 2012
<http://kabutinstitut.blogspot.com/2009/11/orang-jawa-ilang-pekarangane.html> diunduh pada 8 November 2012
<http://www.tembi.org/majalah-prev/20100705.htm> 8 November 2012
<http://id.wikipedia.org/kraton-yogyakarta>